

Bioetika Pertanian dalam Kearifan Lokal di Indonesia

Ashari
Balai Penelitian Ternak

ABSTRACT

Agricultural Bioethics of Local Wisdom in Indonesia. There are 746 local languages owned by the various tribes in Indonesia. This language diversity indicate cultural diversity in the country, followed by local wisdoms on management of biological resources and their ecosystems, which is loaded with conservation concepts. These wisdoms composed of social norms that are performed and honored by a community or intercommunity. Some of the local wisdoms contain many noble values as ideal concepts, while the other contain negative norms that are in contrary to the spirit of development. The noble values in the perspective of agricultural development is called "the traditional agricultural bioethics" (*bioetika pertanian tradisional*). Field experiences and interactions of understanding on some examples of agricultural bioethics in daily lifes in villages from Sabang (the far western part of Indonesia) to Merauke (the far eastern part of Indonesia), which are related to the development of science and technology and advancement in industry are still neglected or have not been paid attention properly. The bioethical values in community are actually the basic strength of the society in regional building and development. The fading off in the local languages that contain noble values is in accordanc with the neglect, lack attention, or gradual erosion of the languages. Presently, in accordance with the noble values of agriculture bioethics, there has been no special touch of understanding, particularly in relation to research and development. A small community of Marin tribe of Merauke, which is isolated and under debeloped, had practiced conservation in maintaining sago as food source. In the northern part of Lima Puluh Koto District of West Sumatera, there has been a local rules/perception on fish harvest; fish harvest only done at certain months. "Tanah ulayat" or tribe's property, a traditional concept for security of the community's asset, is currently considered as hampering the regional development. "Sistem ladang berpindah" (nomadic cultivation systems) those has been traditionally and widely practiced by indigenous farmers are actually containing conservation concepts on maintaining security of food production. The Badui Dalam tribe with their simplicity and unadornment always guard their biotic agricultural ennvirment (plants and animals) based on local wisdoms. The Balinese community with their "Subak" system on watering management of their rice fields, is another local wisdom related to the honored agricultural bioethics and becomes a part of and contribute to development concepts that has been conserved. The Toraja tribes highly honor to their ancestors to meet the Creator, but they are not balanced with the need of their future generation. Based on the understanding of local wisdom as traditional agricultural bioethics, some conclusions are drown: (1) Local wisdoms those are used as noble moral values have both positive and negative implication/contents to the national developments. Some of the negative implications still have potential as break through in the regional development if we can use social policy and communicate effectively for the public benefit/interest through the arbitrary of regional government and tradition. The positive implica-tion can be ideal concepts for regional development; (2) Agriculture bioethics in the local wisdom of minority inland tribes, under developed and far from the touch of modern culture that have development concepts that become cultural wellbeing need to be exploed, studied, maintained, and developed; (3) More attention is needed on potentials of

local social community and culture, particularly on implication of local language and wisdoms to the national development.

Key words: Agriculture bioethics, local wisdom, national development.

ABSTRAK

Bioetika Pertanian dalam Kearifan Lokal di Indonesia. Indonesia memiliki 746 bahasa daerah yang menunjukkan keanekaragaman bahasa mencerminkan keanekaragaman budaya yang disertai keberadaan kearifan-kearifan lokal dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hayati dengan ekosistemnya yang bermuatan konsep konservasi. Kearifan-kearifan tersebut merupakan norma-norma sosial yang berlaku dan dihormati baik oleh suatu komunitas maupun lintas komunitas. Banyak kearifan lokal yang bernilai luhur sebagai konsep ideal, tetapi beberapa di antaranya bermuatan “negatif” bagi semangat pembangunan. Nilai-nilai luhur dalam perspektif pembangunan pertanian disebut bioetika pertanian tradisional. Berdasarkan pengalaman dari interaksi tentang bioetika pertanian dalam kehidupan sehari-hari pada dengan masyarakat pedesaan dari Sabang hingga Merauke, perkembangan ilmu dan teknologi dan kemajuan di bidang industri pada umumnya masih kurang mendapat perhatian. Sesungguhnya nilai bioetika merupakan kekuatan dasar dalam pengembangan dan pembangunan dalam masyarakat. Lunturnya bahasa daerah yang mengandung nilai-nilai luhur terjadi akibat kurang pedulinya masyarakat setempat, sehingga terjadi erosi bahasa daerah. Nilai-nilai luhur bioetika pertanian yang ada hingga saat ini belum mendapat sentuhan yang memadai, terutama berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan. Suatu komunitas kecil suku Marin di Merauke yang terisolir dari kemajuan telah menerapkan konservasi untuk memelihara tanaman sago sebagai sumber pangan. Di sebelah utara kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera barat, terdapat aturan tentang cara panen ikan yang hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Tanah ulayat yang merupakan konsep tradisional untuk mengamankan aset komunitas, saat ini dianggap menghambat pembangunan daerah. Ladang berpindah yang telah dilakukan secara luas oleh petani setempat, sesungguhnya mengandung konsep konservasi untuk memelihara keamanan produksi pangan. Suku Badui Dalam dengan kesederhanaannya selalu menjaga lingkungan biotik pertanian (taaman dan hewan) berdasarkan kearifan lokal. Komunitas di Bali dengan Sistem Subak, suatu sistem pengelolaan padi sawah pada komunitas di Bali juga merupakan kearifan lokal yang memiliki nilai bioetika yang luhur dan menjadi bagian yang mendukung konsep pembangunan. Suku Toraja sangat menghormati leluhurnya untuk berhubungan dengan Penciptanya, tetapi kurang diimbangi dengan pemikiran tentang kebutuhan masa depan keturunannya. Berdasarkan kearifan lokal dapat dijadikan sebagai dasar bioetika pertanian tradisional, maka dapat disimpulkan dan disarankan bahwa: (1) Banyak kearifan lokal yang luhur memiliki nilai positif dan ideal untuk pembangunan daerah, tetapi ada juga yang bersifat negatif bagi pembangunan. Kearifan yang bermuatan negatif, masih dapat dimanfaatkan sebagai terobosan dalam pembangunan daerah, jika dapat menyiasatinya secara sosial dan berkomunikasi secara efektif bagi kepentingan umum, melalui kewenangan pemerintah daerah dan adat. Yang bermuatan positif dapat merupakan konsep ideal bagi pembangunan daerah; (2) Bioetika pertanian dalam kearifan lokal suku-suku minoritas di pedalaman yang terbelakang dan jauh dari sentuhan budaya maju dijumpai konsep-konsep pembangunan yang menjadi kekayaan budaya dan perlu digali, dipelajari serta dilestarikan, (3) Perlu lebih diperhatikan potensi sosial budaya lokal dengan bahasa dan muatan kearifan-kearifan dalam bioetika pertanian yang dianutnya serta maknanya bagi pembangunan pertanian.

Kata kunci: Bioetika pertanian, kearifan lokal, pembangunan nasional.

PENDAHULUAN

Kearifan lokal pada hakekatnya merupakan sikap masyarakat lokal yang umumnya sangat lekat dengan ketradisional dan kesederhanaan dalam menyikapi lingkungannya untuk kepentingan komunitasnya secara serasi dan ramah lingkungan serta umumnya merupakan norma-norma (tata nilai) sosial yang berlaku dan dihormati oleh komunitas bersangkutan. Sifat dari nilai-nilai tersebut dapat bersifat universal yang diterima oleh semua pihak, yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Namun nilai atau norma yang dikandungnya terkadang bersifat spesifik lokasi, yang hanya berlaku untuk komunitas itu sendiri yang bernilai positif, di samping ada yang bermuatan negatif.

Kearifan lokal dalam perkembangan modernisasi dan kemajuan peradaban, keberadaannya sering dianggap kuno, ketinggalan jaman, kolot, dan sebagainya yang member stigma “masyarakat tidak maju” sehingga dalam banyak kasus sering suatu komunitas diremehkan dan lebih dari itu secara fisik dapat mengalami penggusuran. Namun beberapa di antaranya nilai-nilai yang dikandungnya bermuatan konsep dalam pembangunan. Orientasi yang tertanam dalam pendidikan nasional telah membenamkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang di antaranya bahwa yang berbau lokal sama artinya dengan tidak maju, tidak modern, ketinggalan jaman. Lain halnya dengan Swadeshi nya Mahatma Gandhi, yang mengantarkan kebangkitan bangsa India yang akan mensejajarkan dengan dengan kebangkitan Cina, sebagai negara raksasa baru yang disegani.

Bioetika pertanian (pengertian bebas nilai dari muatan lokal maupun “Barat”) adalah tata nilai komunitas sosial yang berlaku dalam menyikapi lingkungannya untuk kepentingan bersama dalam mempertahankan hidup untuk memperoleh sumber pangan secara berkesinambungan melalui penggunaan langsung maupun tidak langsung, dengan atau tanpa memanfaatkan pemanfaatan teknologi serta dalam bentuk lainnya. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah tata cara dan atau perilaku dalam mengelola pemanfaatan sumber daya hayati yang dimanfaatkan. Dalam hubungan itu, ada berbagai bentuk bioetika pertanian dalam kehidupan sehari-hari yang dijumpai sebagai kearifan lokal, yang menyangkut hak dan kewajiban warga komunitas. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks, keberadaan bioetika pertanian merupakan tuntutan yang tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban dari para pengguna/pelaku terkait, namun juga menyangkut kepada moral, hukum, dan kesopanan santunan terhadap sesama makhluk hidup.

Masalahnya adalah sampai saat ini belum adanya perhatian terhadap nilai-nilai luhur lokal sebagaimana disebutkan di atas dan semakin tererosinya budaya lokal serta belum terakomodasinya permasalahan-permasalahan perkembangan bioteknologi dalam tiga pilar bioetika kehidupan. Oleh karena itu makalah ini bertujuan untuk mengajak merenungkan dan mengambil nilai manfaat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal dan perlunyaantisipasi perkembangan iptek bioteknologi khususnya bagi tujuan pembangunan dan ke-maslahatannya bagi bangsa Indonesia.

BEBERAPA CONTOH KERARIFAN LOKAL SEBAGAI KONSEP PEMBANGUNAN

1. Suku Marin, bioetika dalam penyelamatan sumber pangan: sagu

Suku bangsa ini merupakan salah satu dari ratusan suku-suku bangsa di Indonesia (lebih dari 250 suku bangsa di Papua) yang ada di Kabupaten Merauke yang tersebar secara

terbatas di tiga Kecamatan di Kabupaten Merauke, yaitu Kecamatan Muting, Merauke, dan Kimaan. Dimanapun di dunia ini kearifan-kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur lokal selalu mempunyai dua sisi makna yang bermuatan negatif maupun yang bermuatan positif. Tidak terkecuali di Papua ini juga dijumpai kearifan budaya tradisional dengan “nilai-nilai luhur” lokal yang tidak atau kurang mempunyai makna dalam spiritual pembangunan. Di suku ini ketika menghormati tamunya, tamu yang dihormati itu diberi suguhan khusus berupa air minum yang diberi kunyahan “tanaman wati” dari kepala suku. Tanaman wati adalah tanaman yang digunakan oleh suku tersebut sebagai salah satu sajian masakawin; tanaman ini mempunyai daya halusinasi. Dengan budaya ini, berpotensi terhadap penyebaran penyakit, seperti pada kasus penyebaran penyakit Lepra di Kecamatan Mokaba. Namun dibalik nilai-nilai kearifan yang negatif terhadap pembangunan, suku ini mempunyai aturan (tidak tertulis) sebagai kearifan lokal yang bermuatan potensial sebagai konsep dasar ketahanan pangan. Sampai saat ini tidak ada satu sukupun di Indonesia atau bahkan peraturan pemerintah yang melindungi kawasan sagu sebagai sumber pangan atau sebagai kawasan cadangan pangan nasional. Bahkan status tanaman sagu yang berkontribusi bagi masyarakat Maluku sebagai sumber pangan karbohidrat sebesar 30%, belum ada satu instansi pun yang merasa untuk merawat lebih-lebih untuk mengembangkan. Padahal pada tahun 1991 di Ambon telah diselenggarakan Seminar Nasional tentang tanaman sagu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku bersama Universitas Pattimura (Unpati) dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, ternyata sampai akhir 1997 belum ada tindak lanjut dari para pemangku kepentingan utama, bahkan belum ada satu instansi pun yang berwenang untuk mengembangkan. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya tindak lanjut setelah seminar nasional dan oleh kenyataan bahwa dalam setiap pembukaan lahan-lahan baru (transmigrasi atau lainnya) nasib tanaman ini tidak lagi mendapat ruang lagi bagi kepentingan konservasi walaupun tanaman ini mempunyai fungsi strategis bagi penyangga ketahanan pangan nasional terutama untuk wilayah Maluku dan Papua. Adalah suatu keajaiban yang mengejutkan bahwa ditengah-tengah ketidakpedulian terhadap peran besar tanaman sagu, kearifan lokal masyarakat pedalaman yang jauh dari budaya maju, memiliki cara pandang hidup yang berwawasan lingkungan, sebagai suatu keunggulan budaya nasional yang dapat merupakan kekayaan budaya yang harus dikembangkan. Suku ini di dalam setiap transaksi penyerahan lahan kepada pihak lain, kawasan sagu yang disebut sebagai dusun sagu tidak termasuk sebagai bagian yang ditransaksikan. Dalam hubungan itu, kita perlu banyak belajar dan perlu menaruh perhatian lebih pada kearifan-kearifan tradisional yang sering kita abaikan sebagai norma tata nilai lokal yang mempunyai kekuatan bagi konsep pemnangunan nasional dari pedalaman di Papua.

2. Ladang berpindah, bioetika pertanian sebagai konsep terpadu-berotasi

Kegiatan usaha tani dalam bentuk ladang berpindah adalah merupakan bentuk kearifan tradisional lokal sebagai bentuk usaha tani yang berwawasan lingkungan, di mana tingkat kelonggaran lahan dan keterbatasan masa kesuburan lahan di lingkungannya berdasarkan pengalaman masyarakat pedalaman memberikan pilihan-pilihan untuk memperoleh hasil produksi pertaniannya secara optimum dengan melakukan kegiatan ladang berpindah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan berdampak pada proses pemiskinan tanah dan tidak memberikan hasil. Banyak kasus daerah transmigrasi yang ditinggalkan oleh penguasa lahannya karena setelah tanah diolah terus menerus (lima tahun atau

lebih) lahan olahan transmigrasi tidak memberikan hasil sama sekali. Dari praktek ladang berpindah memberikan informasi berikut:

Kondisi potensi lahan: luas (umumnya tidak mempunyai batas administrasi), penduduk sangat jarang, kesuburan tanah terbatas, tidak punya akses input-output produksi, terpengaruh dari kemajuan.

Muatan konsep: pemahaman keterbatasan kesuburan, pola tanam berpindah dalam periode tahunan, **pola rotasi** pemanfaatan.

Improvisasi: pola budi daya tanaman terpadu dengan ternak sebagai komponen diversifikasi pendapatan dan input produksi berpola rotasi secara terbatas dan menetap.

3. Tanah ulayat, bioetika pertanian pengamanan lahan, sebagai potensi pertumbuhan daerah

Tanah ulayat atau tanah milik bersama adalah kekayaan masyarakat lokal yang secara adat tidak boleh diperjualbelikan. Kalau harus dijual akan melalui proses panjang aturan adat yang kemungkinan kecil dapat lolos. Tanah ulayat menyebar di banyak wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang mempunyai kekentalan atau intensitas tata nilai dan berbeda-beda. Di Sumatera Barat hamparan kawasan adat terkecil yang disebut sebagai hamparan kaum diketuai oleh seorang datuk. Di Maluku diketuai oleh raja kecil setingkat dengan kepala suku. Di Papua diketuai oleh kepala suku. Masing-masing organisasinya berbeda dengan aturan yang berbeda, di Kalimantan lain lagi, namun sayangnya hampir tidak ada sentuhan penelitian terhadap tanah adat, acuan sangat terbatas. Tanah ulayat umumnya dicirikan oleh ketidakjelasan administrasi, status, batas, dan tidak ada intensifikasi pemanfaatan.

Organisasi tanah ulayat yang paling baik adalah untuk masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Peran ulama, adat dan penguasa atau pemerintah merupakan satu kesatuan dalam menjaga adat. Struktur pemerintahan desa yang berbasis adat pada masa orde baru diarahkan untuk dihapuskan, yang diatur dalam sistem pemerintahan desa/keurahan seperti di Jawa. Namun pasca Orde Baru perubahan itu dikembalikan pada sistem nagari, yang merupakan sistem pemerintahan adat.

Sampai saat ini tanah ulayat dianggap penghambat pembangunan karena tidak bisa diberi. Namun sebenarnya tanah ulayat tersebut merupakan potensi raksaksa tidur yang melindungi masyarakatnya. Dalam status tanah ulayat, tidak ada hutan rusak, walaupun pemanfaatan sangat terbatas. Pemahaman terhadap potensi menjadi sangat penting untuk membangunkan raksaksa tidur. Melalui berbagai diskusi dengan beberapa datuk dan beberapa dinas terkait (Sosial, Kehutanan, Peternakan, Bappeda) setempat pembinaan berbasis kawasan kaum dengan datuk sebagai ketua kelompok dan disertai program terobosan catur tertib Bappeda (program tata ruang), yaitu dapat dicapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib rawat, dan tertib guna, maka tanah ulayat pemanfaatannya dapat menjadi terobosan ketahanan pangan khususnya dan pertumbuhan daerah pada umumnya. Tanpa catur tertib tanah ulayat akan tetap tanah ulayat yang tidak produktif, akan tetap menjadi stigma tanah penghambat pembangunan. Dengan kekuatan adat yang berporos pada Ninik Mamak-Ulama-dan Umaro (Pemerintah/Cendekiawan, maka konservasi sumber alam: air, tanah, hutan dengan kekayaan sumber daya hayatinya tetap merupakan lingkungan yang sehat dan mendukung kehidupan masyarakat tanpa

bencana banjir, longsor yang mendukung kehidupan masyarakat adat (Ashari *et al.* 2007).

4. Sabuk larangan, bioetika pengelolaan sumber pangan: ikan alami di Sumbar

Ada bioetika pertanian berupa kearifan lokal di Sumatera Barat yang hanya spesifik lokasi yang lebih berbasis pada kawasan kaum. Kawasan kaum adalah satuan terkecil hamparan lahan tanah ulayat yang memberi aturan khusus dalam memanfaatkan sumber hayati ikan di sungai, yaitu di Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Sebuah sungai yang mempunyai potensi sebagai sumber ikan diberi tanda sederhana, dengan sebuah tali panjang yang melintang melintasi sungai sebagai tanda (sabuk) larangan untuk memanen ikan. Ikan hanya dipanen pada waktu-waktu tertentu saja yang ditetapkan oleh komunitas bersangkutan berdasarkan pengalaman kesehariannya dan kesepakatan bersama (Ashari *et al.* 2007).

5. Subak, bioetika pengelolaan sumber pangan: sawah (Bali)

Subak adalah organisasi pengelola air yang berbasis adat (Bali), sebagai bioetika pertanian unggulan di Indonesia, sehingga dalam soal pengairan peranan pemerintah hanya terlibat secara terbatas. Satuan subak berupa sebuah hamparan sistem pengairan. Dalam satu desa dapat mempunyai beberapa subak atau dalam satu subak dapat meliputi beberapa desa. Seorang warga dapat menjadi beberapa anggota subak, apabila dia mempunyai beberapa petak lahan yang tersebar di beberapa subak. Organisasi ini hidup dalam kehidupan adat masyarakat Bali. Tidak ada sanksi fisik ataupun denda bagi yang melanggar, hanya terkena sanksi sosial. Berbeda dengan ulu-ulu di Jawa, yang merupakan bagian seksi pengelola pengairan dalam struktur organisasi desa. Dalam struktur ini sering diperlukan jadwal pengawasan seperti ronda, seperti halnya "mitra cai" di Jawa. Dalam sistem subak masih ada kejujuran, masih ada keadilan dan masih ada perawatan lingkungan. Sumber air umumnya dari gunung, yang hutannya juga dijaga oleh warga yang menerapkan adatnya.

PEMBOROSAN DALAM KONSERVASI MODERN

Banyak proyek-proyek konservasi air dan tanah telah dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengembangan maupun kajian baik melalui anggaran pemerintah murni maupun melalui dana bantuan. Dana bantuan dapat berupa hibah dan pinjaman lunak. Proyek-proyek dengan basis orientasi konservasi tanah, air, dan hutan tertuang dalam berbagai kegiatan dalam judul-judul Rehabilitasi Lahan Kritis, DAS (daerah aliran sungai), Reboisasi, Konservasi Lahan dan Air bahkan dengan muatan judul Pengentasan Kemiskinan. Proyek-proyek bantuanpun disertai dengan tenaga-tenaga ahli asing yang sepintas memberikan gambaran kualitas dan kesungguhan kegiatan yang dilakukan, sebagai kegiatan **koservasi modern** yang ditunjang dengan berbagai kegiatan ilmiah dan terapan di lapang.

Dari proyek-proyek tersebut banyak kecenderungan ketidakberhasilan. Dari "keberhasilan-keberhasilan" yang ada belum berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sekedar contoh dari sebuah proyek kajian yang berjudul "Mbangun Deso" atau Membangun desa di wilayah Yogyakarta pada awal tahun 1990-an. Proyek ini meliputi tiga lokasi (desa) yang pendanaannya sekitar Rp 3 miliar (kurs 1 US\$ = Rp 2.000) yang dengan nilai sekarang sekitar lebih dari Rp 13 miliar. Kalau dilihat sekarang daerah proyek tersebut kon-

disinya serupa dengan daerah sekitarnya yang tidak mendapat proyek, alias tidak ada sesuatu acuan yang didapat dari kegiatan proyek. Kondisi serupa dapat disaksikan pada bekas-bekas proyek lainnya yang dikerjakan dengan bantuan tenaga ahli asing yang hanya memperlihatkan pemborosan uang rakyat. Informasi dari Depatemen Kehutanan (2008) anggaran untuk perbaikan hutan tahun 2008 mencapai Rp 8,5 triliun yang hasilnya setiap tahunnya terus diragukan. Hal ini terlihat dari semakin parahnya debit air daerah sekitar kegiatan proyek-proyek yang dilakukan, disertai dengan makin meluasnya kerusakan lingkungan yang terus menunjang proses pemiskinan. Banjir semakin meluas dengan intensitas kerusakan yang semakin parah. Demikian pula saat musim kemarau, kekeringan semakin meluas dengan durasi yang semakin panjang. Jadi musim hujan masalah banjir, musim kemarau bermasalah dengan kekurangan air sebagai sumber kehidupan. Kondisi lingkungan yang parah menjadi lingkungan terbiasa untuk proses kemiskinan.

Pada umumnya daerah kegiatan proyek-proyek konservasi merupakan daerah pemborosan disertai semakin parahnya pembalakan liar. Yang menyulitkan bahwa keterlibatan oknum-oknum penting secara tersenbunyi, sebagai mafia kejahatan kerusakan lingkungan yang belum terbongkar secara utuh. Kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan Sumatera Selatan hanya merupakan sebuah pemunculan permukaan dari sebuah jaringan besar yang luas, yang melibatkan banyak pihak. Di samping itu, ada pengawalan khusus pembalak-pembalak liar dalam sebuah jaringan yang luas dan kuat dan sangat sistematis. Di pulau Bangka Tim Analisis Potensi Wilayah Pengembangan Peternakan (1997) pada kesempatan verifikasi lapang diberitahu rumah pengusaha muda eksportir kayu yang kebal hukum, karena dukungan oknum penting dalam aksinya. Hal serupa terjadi pada kerusakan lingkungan di laut. Hilangnya pulau-pulau kecil di Riau dan beberapa tempat lain serta aberasi sepanjang pantai (termasuk pantura Jawa) karena penyedotan jarak jauh (7-10 km) "pasir laut" yang dilakukan malam hari oleh kapal asing (Singapura) sebagai kejahatan untuk memperluas daratan.

Kondisi yang sedemikian parah, juga dibantu oleh pencuri-pencuri lokal yang membantu pencuri internasional atau untuk keperluan hanya untuk kebutuhan lokal. Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup tidak memberikan perhatian khusus yang hanya menilai tingkat kerusakan terumbu karang yang mencapai sekitar 80%. Kelengkapan kerusakan demikian ditambah oleh pencemaran dari daerah industri di daratan. Hasil wawancara di kawasan pantura Kabupaten Bekasi (Ashari *et al.* 2006) menunjukkan bahwa penurunan produksi akibat cemaran pabrik industri di Bekasi mencapai 75% dan dalam kondisi tertentu para petambak tidak menghasilkan apa-apa karena pencemaran tersebut. Cemaran tersebut juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan di laut. Dalam hubungan itu, maka pemberian modal menjadi tidak berarti karena sebab utama kemiskinan adalah kerusakan lingkungan. Sehingga agenda utama dalam pengentasan kemiskinan salah satunya adalah memperbaiki, menjaga, merawat lingkungan melalui partisipasi masyarakat sebagaimana diperlihatkan partisipasi masyarakat adat.

PEMBAHASAN

Suku Minoritas dengan Bioetika Pertaniannya

Dalam struktur suku bangsa di Indonesia, Suku Marin adalah suku sangat amat minoritas dibandingkan 11 suku besar dengan tingkat budayanya yang jauh lebih maju. Suku ini

minoritas dalam jumlah, minoritas dalam sebaran, minoritas dalam bahasa, minoritas dalam budaya, minoritas dalam peggung kesukuan, yang tidak termasuk dalam suku mayoritas Tabel 1.

Dari Tabel 1, dalam urutan jumlah suku dengan 250-an bahasa daerah di Papua, suku Marin kalau didata akan berada dalam urutan yang paling bawah yang secara kuantitatif akan menunjukkan angka urutan 0,00000.....%. Namun dalam kearifannya suku hiper minoritas ini mampu memberi inspirasi bagi konsep pembangunan berkelanjutan.

Memupuk Budaya, Memanen Kinerja Pembangunan

Sebagaimana kita ketahui bahwa program pemerintah dalam konservasi air, tanah dan hutan melalui berbagai kegiatan pembangunan baik melalui anggaran domestik maupun bantuan luar negeri telah menghabiskan dana yang tidak sedikit yang hasilnya tidak tampak sampai sekarang, bahkan perambahan hutan berupa pembalakan liar masih berjaya, penyedotan pasir jarak jauh juga tetap berjaya dengan program-program konservasi yang tidak kunjung meperlihatkan hasil. Program-program konservasi pemerintah yang telah dilakukan selama ini lebih merupakan sebagai bentuk pemborosan yang terus merongrong negara dan rakyat, dengan pengeluaran anggaran sejak program dicanangkan telah mencapai ratusan triliun rupiah, sementara masyarakat diposisikan dalam proses kemiskinan. Oleh karena itu perlu disambut sebagai semangat kebangkitan untuk pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah “menghentikan” kegiatan HPH yang cenderung menjadi penampung pembalakan liar. Langkah Gubernur Gorontalo yang kemudian diikuti oleh Gubernur Aceh dan Papua pada awal 2008 untuk menghentikan dan sangat membatasi kegiatan HPH. Kepada ketiga pemerintah daerah sepatutnya mendapat penghargaan Lingkungan Hidup walau perlu verifikasi lapang.

Dari pengalaman selama ini dengan proyek-proyek kegiatan konservasi yang berada dalam klas pemborosan dan menunjang proses pemiskinan, sudah saatnya pemerintah walaupun terlambat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan kekuatan kearifan lokal adatnya dalam lingkup bioetika pertaniannya maupun dalam kesadaran usaha kelompoknya yang non adat sebagai “simpul keberhasilan” usaha pemerintah. Oleh karena itu

Tabel 1. Komposisi suku bangsa berbasis penggunaan bahasa daerah.

No.	Bahasa daerah	Persentase pengguna
1.	Jawa	60,0
2.	Sunda	14,0
3.	Madura	6,0
4.	Minang	5,0
5.	Bugis	2,5
6.	Batak	2,5
7.	Bali	2,5
8.	Banjar	1,5
9.	Sasak	1,5
10.	Aceh	1,5
11.	Makasar	1,5
12.	Lain-lain	1,5
Total		100,0

Sumber; Pusat Pengembangan Bahasa (2008).

sudah saatnya pemerintah mengakomodasi kekuatan-kekuatan masyarakat yang berbasis adat sebagai kekuatan bioetika pertanian maupun kekuatan lainnya untuk disinergikan dengan program-program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan. Simpul-simpul keberhasilan yang telah berkembang di masyarakat perlu dilembagakan, dikuatkan, diberikan nilai ekonomi untuk menjadi agen-agen terobosan (alih teknologi dan informasi) perubahan perbaikan kualitas masyarakat dan lingkungannya dalam menciptakan peningkatan partisipasi masyarakat menunjang pembangunan berkelanjutan, melalui sebuah konsep VOLARE (Ashari 2001).

PENUTUP

Kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur lokal ada yang bermuatan positif maupun yang bersifat negatif bagi pembangunan. Di antara yang bermuatan negatif, masih mempunyai potensi bagi terobosan pembangunan daerah apabila mampu menyalakan secara sosial berkomunikasi secara efektif bagi kepentingan umum, yang bermuatan positif dapat merupakan konsep pembangunan daerah.

Dalam kearifan lokal suku-suku pedalaman yang minoritas, terbelakang, jauh dari sentuhan budaya maju mereka memberikan konsep-konsep pembangunan yang menjadi kekayaan budaya nasional.

Banyak kearifan lokal yang terkait dengan sumber daya pertanian dengan ekosistemnya, mempunyai kekuatan konsep konservasi, perlu digali, dipahami, dan dikembangkan.

Memupuk budaya lokal dengan muatan bioetika pertaniannya akan memajukan kinerja pembangunan pertanian.

Perlunya pemerintah menginventarisasi "bioetika-bioetika" lokal dalam kearifan lokal dan simpul-simpul keberhasilan lain dari usaha pemerintah untuk dilembagakan, dikuatkan, diberikan nilai ekonomi, dan dijadikan sebagai sentra pengentasan kemiskinan dan sebagai sentra belajar masyarakat dalam prinsip "*teaching by showing, learning by doing*".

Perlunya catur tertib tanah ulayat untuk menjadi program terobosan strategis pusat dan daerah sebagai langkah percepatan pembangunan pertanian.

BAHAN BACAAN

Ashari. 2001. VOLARE, percepatan transformasi budaya tradisional menuju berbudaya industri. Jurnal Produksi Peternakan, Edisi Khusus. Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Sudirman.

Ashari, E. Juarini, Sumanto, B. Wiboro, dan Hariadi. 1998. Analisis Potensi Wilayah Pengembangan Peternakan Provinsi Irian Jaya. Kerja sama Balitnak-Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta.

Ashari, E. Juarini, Sumanto, B. Wiboro, H.L. Prasetyo, B. Setiadi, dan B. Arsana 2007. Analisis Potensi Wilayah Pengembangan Peternakan Kota Padang. Kerja sama Balitnak-Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Padang.

Humas Departemen Kehutanan. 2008. Komunikasi pribadi. Jakarta.

Pusat Pengembangan Bahasa. 2008. Komunikasi Pribadi. Jakarta.